

Editor: Dr. Inanna, S.pd., M.pd.



EKONOMI POLITIK

(TEORI DAN IMPLEMENTASINYA)



Buku Ajar

Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.
Muhammad Dinar, S.E., M.S.
Dr. Marhawati, M.Si.

EKONOMI POLITIK
(TEORI DAN IMPLEMENTASINYA)

Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.
Muhammad Dinar, S.E., M.S.
Dr. Marhawati, M.Si



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**EKONOMI POLITIK
(TEORI DAN IMPLEMENTASINYA)**

Penulis:

Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.

Muhammad Dinar, S.E., M.S.

Dr. Marhawati, M.Si

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii,111, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-039-3

Cetakan Pertama:

Mei 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME atas lindungan dan rahmat-NYA sehingga naskah buku Referensi dengan Judul “*Ekonomi Politik: Teori & Implementasinya*” dapat terselesaikan. Penulisan buku dengan judul *Ekonomi Politik: Teori & Implementasinya* merupakan buku referensi untuk menambah wawasan keilmuan guna mendukung proses pembelajaran. Pokok-pokok bahasan dalam buku ini mencakup: 1. Ekonomi Politik Lingkungan Hidup; 2. Ekonomi Politik Negara Kesejahteraan; 3. Ekonomi Politik Stabilitas Sosial; 4. Ekonomi Politik Pembangunan Ekonomi; 5. Ekonomi Politik Sektor Maritim; 6. Ekonomi Politik Globalisasi ; 7. Ekonomi Politik Sumber Daya Hutan; 8. Ekonomi Politik Sektor Pertanian.

Tak dapat dipungkiri dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan sehingga penulis membutuhkan saran dari para pembaca untuk kesempurnaannya. Demikian pula penulis menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun materil sehingga buku ini dapat terselesaikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan buku “*Ekonomi Politik: Teori & Implementasinya*” kepada kalangan pembaca baik Akademisi, Dosen, Peneliti, Mahasiswa atau Masyarakat pada Umumnya.

Makassar, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
Bab 1 Ekonomi Politik Lingkungan Hidup	1
A. Pengantar	1
B. Definisi Politik lingkungan.....	2
C. Teori Politik Lingkungan	5
D. Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia.....	7
E. Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia	10
F. Penutup	15
Referensi.....	16
Bab 2 Ekonomi Politik Negara Kesejahteraan	18
A. Pengantar	18
B. Konsep Negara kesejahteraan menurut pandangan hidup bangsa Indonesia	19
C. Sejarah Dan Evolusi Negara Kesejahteraan	23
D. Negara Kesejahteraan Konteks Indonesia	27
E. Negara Kesejahteraan Konteks Modern	28
F. Negara Kesejahteraan Konteks Islam.....	29
G. Penutup	31
Referensi.....	32
Bab 3. Ekonomi Politik Stabilitas Sosial.....	34
A. Pengantar	34
B. Konteks Kestabilan Sosial di Indonesia	35
C. Peran Pemerintah Dalam Kestabilan Sosial	37
D. Hubungan Ekonomi dan Kestabilan Sosial	40
E. Penutup	42
Referensi.....	44
Bab 4 Ekonomi Politik Pembangunan Ekonomi	45
A. Pengantar	45
B. Ekonomi Politik Pembangunan	46
C. Mengejar Pertumbuhan Ekonomi	47

D. Ketimpangan Ekonomi Sebagai Paradoks	49
E. Perlunya Afirmasi Pembangunan	51
F. Kesenjangan Ekonomi Wilayah.....	54
G. Memperkuat Akses Pemerataan Pembangunan	55
H. Penutup	56
Referensi.....	59
Bab 5 Ekonomi Politik Sektor Maritim.....	60
A. Pengantar	60
B. Pengertian Ekonomi Politik dan Maritim	61
C. Ekonomi Kemaritiman	63
D. Sektor Maritim Berpotensi Ekonomi.....	65
E. Penutup	67
Referensi.....	70
Bab 6 Ekonomi Politik Globalisasi	71
A. Pengantar	71
B. Pengertian Ekonomi Politik Global	73
C. Perspektif Ekonomi Politik Global.....	75
a) Perspektif Merkantilisme.....	75
b) Perspektif Liberalisme	76
c) Perspektif Marxisme.....	77
D. Dinamika Ekonomi Politik Global	78
E. Perdagangan Internasional.....	80
F. Krisis Ekonomi Politik Global	81
G. Penutup	83
Referensi.....	85
Bab 7 Ekonomi Politik Sumber Daya Hutan.....	87
A. Pengantar	87
B. Definisi Sumber Daya Hutan dan Penggunaannya	88
C. Tujuan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.....	91
D. Jenis Sumber Daya Hutan.....	92
E. Manfaat Sumber Daya Hutan Dalam Ekonomi	93
F. Hutan Kemasyarakatan.....	97
G. Penanggulangan Kerusakan Hutan Secara Umum	98
H. Penutup	99
Referensi.....	100

Bab 8 Ekonomi Politik Sektor Pertanian	101
A. Pengantar	101
B. Definisi Sektor Pertanian	101
C. Kebijakan Pemerintah terhadap Sektor Pertanian	103
D. Teori Ekonomi dalam sektor pertanian	104
E. Peran Kelompok Kepentingan dalam Sektor Pertanian.....	105
F. Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kebijakan Pemerintah dan Kelompok kepentingan terhadap Sektor Pertanian.....	106
G. Penutup	109
Referensi.....	110
PROFIL PENULIS	111

BAB 1

EKONOMI POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

A. PENGANTAR

Ekonomi politik lingkungan umumnya berfokus pada kualitas kelembagaan atau ideologi pemerintah. Percakapan yang menyertainya akan mengarah pada pertukaran antara pemikiran moneter dan politik dari satu sudut pandang dan pemikiran ekologis di sisi lain. Unsur-unsur lingkungan hidup yang berdampak nyata pada perkembangan ekonomi dan politik serta menjadi landasan pandangan kita ke depan menjadi inti permasalahan ini (Uzar, 2020). Bagian lingkungan yang akan mengutamakan aspek kelompok masalah “krisis lingkungan” akan menjadi fokus perhatian sehubungan dengan pandangan dari perspektif ekonomi dan politik yang akan ditonjolkan. Hal ini menyebabkan persoalan ekonomi masyarakat yang memiliki konsekuensi politik (bercabang pengaruh dan aspek politik). Sebaliknya, kondisi lingkungan masyarakat yang bersangkutan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan politik baik dalam masyarakat maupun dalam hubungan antarnegara.

Indonesia masih belum mampu menumbuhkan perekonomiannya setara dengan beberapa negara maju yang mempunyai SDA yang melimpah (Saavedra, 1993). Pertumbuhan ekonomi yang lamban tidak semata-mata disebabkan oleh sumber daya alam. Bagaimana pembuat kebijakan dan pengelola sumber daya alam memilih tindakan terbaik sangatlah penting, dan ini termasuk tidak hanya mengadopsi kebijakan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk sumber daya alam tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan yang mereka miliki. Selain mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan, degradasi lingkungan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Penipisan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan kini menjadi topik perbincangan yang lumrah. Kerusakan lingkungan tidak hanya akan mempersulit SDA dan jasa lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi berdampak serius di tengah penderitaan sosial yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, antara lain kehabisan dan kelangkaan pangan. Apalagi masyarakat menanggung biaya sosial yang sangat besar akibat kerusakan lingkungan.

Krisis lingkungan merupakan timbulnya beberapa gejala sebagai akibat dari cara pengelolaan yang salah dari sumber-sumber kebutuhan hidup manusia (Fios, 2019; Oakley & Banks, 2020; Selwyn, 2021). Tanda-tanda tersebut kini ditempuh sebagai tekanan krisis yang mengancam berlangsungnya kehidupan manusia, seperti ancaman terhadap kualitas air dan udara, unsur hara, kelangsungan produktivitas sumber daya alam serta fauna dan floranya, dan lainnya.

Ketika melihat ke masa depan, tampaknya ada tiga kategori ancaman yang berbeda terhadap lingkungan manusia: kekurangan pangan bagi penduduk; darurat di bidang ketenagakerjaan (darurat energi) yang saat ini sedang menggoncang perbaikan finansial dan politik dalam kehidupan masyarakat; dan krisis kekurangan mineral. Hubungan antara sumber daya alam yang tersedia, jumlah penduduk yang terus bertambah, dan teknologi yang digunakan manusia saat ini untuk memproduksi dan memanfaatkan bahan baku diduga saling mempengaruhi. Hal ini terutama berlaku di negara-negara maju. alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kehidupan manusia di masa depan tampaknya dibayangi oleh pandangan jauh ke depan mengenai percabangan pengaruh perkembangan faktor populasi, teknologi, dan sumber daya alam (Mahardika, 2022). Ada kekhawatiran bahwa ekosistem menjadi semakin terkuras energi dan komponen mineralnya sehingga mengancam landasan fundamental kehidupan manusia.

B. DEFINISI POLITIK LINGKUNGAN

Peterson mendefinisikan politik lingkungan sebagai strategi yang memadukan isu-isu lingkungan, politik, dan ekonomi untuk mencerminkan transisi dinamis antar manusia dan lingkungan, serta antar berbagai kelompok dalam masyarakat pada skala mulai dari individu lokal hingga transnasional secara menyeluruh. Politik lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh ilmuwan lain, adalah cara untuk memahami interaksi rumit antara ekonomi politik di semua tingkatan lokal, nasional, dan internasional dan lingkungan. Studi politik lingkungan pun dapat dilihat sebagai usaha untuk menafsirkan kondisi politik serta menghubungkannya dengan perubahan lingkungan. Pemahaman politik lingkungan saat ini seringkali terfokus pada tatanan sistem manusia dan pemeriksaan lebih dekat terhadap dinamika atau perubahan lingkungan (Rasyid & Keviola, 2020).

REFERENSI

- Fios, F. (2019). Menjadi Manusia Spiritual-Ekologis Di Tengah Krisis Lingkungan-Sebuah Review. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 12(1), 39–50.
- Hidayat, H., Yogaswara, H., Herawati, T., Blazey, P., Wyatt, S., & Howitt, R. (2018). Forests, law and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. *Asia Pacific Viewpoint*, 59(3), 293–308.
- Is, M. S. (2021). Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311–327.
- Kopnina, H., Washington, H., Taylor, B., & J Piccolo, J. (2018). Anthropocentrism: More than just a misunderstood problem. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 31(1), 109–127.
- Kraft, P. F. E. M. E. (n.d.). *Environmental Policy And Politics*.
- Mahardika, A. G. (2022). Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 58–85.
- Oakley, K., & Banks, M. (2020). Cultural industries and environmental crisis: An introduction. *Cultural Industries and the Environmental Crisis: New Approaches for Policy*, 1–10.
- Putri, T. W. (2020). PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1), 116–127.
- Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2020). Dinamika Peran ngo lingkungan hidup dalam arena politik lokal di provinsi Jambi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).
- Rasyid, I., & Keviola, J. R. F. (2020). Gerakan Earth Hour Tangerang Dalam Perspektif Politik Lingkungan. *Ijd-Demos*, 2(2).
- Robertua, V., & Sigalingging, L. (2019). Indonesia environmental diplomacy reformed: Case studies of greening ASEAN Way and peat restoration agency. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 1–15.
- Rosenbaum, W. A. (2016). *Environmental politics and policy*. CQ press.
- Selwyn, N. (2021). *Ed-Tech Within Limits: Anticipating educational*

- technology in times of environmental crisis. *E-Learning and Digital Media*, 18(5), 496–510.
- Syaputri, M. D. (2017). Peran dinas lingkungan hidup kota Surabaya dalam pengendalian pencemaran air Sungai Brantas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 131–146.
- Usman, A. S. (2018). Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 1–16.
- Uzar, U. (2020). Political economy of renewable energy: does institutional quality make a difference in renewable energy consumption? *Renewable Energy*, 155, 591–603.

BAB 2

EKONOMI POLITIK NEGARA KESEJAHTERAAN

A. PENGANTAR

Istilah "negara kesejahteraan" digunakan untuk menggambarkan sejauh mana negara berkontribusi terhadap kesejahteraan warganya. Salah satu tujuan nasional yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan upaya negara Indonesia sendiri untuk melaksanakan konsep Negara Kesejahteraan. Bahkan ketika demokrasi berkembang, konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi harus disertai dengan kemakmuran; akibatnya, suatu masyarakat tidak akan sejahtera tanpa demokrasi, dan suatu bangsa belum dapat dikatakan telah menerapkan demokrasi jika rakyatnya belum sejahtera.

Kesejahteraan rakyat terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi; bahkan bisa dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera memiliki kehidupan ekonomi yang baik. Artinya, setiap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dasar demokrasi ekonomi di Indonesia tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, khususnya kesejahteraan ekonomi. Akibatnya, warga negara pemerintah Indonesia semua berhak menerima kesejahteraan ini.

Gagasan negara kesejahteraan tidak diimplementasikan melalui proyek sosial jangka pendek parsial untuk mengatasi masalah seperti pengabaian, kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, program-program seperti pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan dan kesehatan, mengatur semuanya bersama-sama. Dalam gagasan ini, pemerintah memiliki suara yang lebih besar dalam bagaimana kesejahteraan sosial yang direncanakan, dilembagakan, dan tahan lama diciptakan. Meskipun pendidikan dan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan wajib dijunjung tinggi oleh negara, namun masalah kualitasnya tetap menjadi perhatian di Indonesia.

B. KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Pada awalnya negara kesejahteraan dipandang sebagai sosialis, keterlibatan eksklusif pemerintah dalam mengelola sistem jaminan sosial. Negara kesejahteraan menjadi semakin demokratis-liberal pada saat itu serta bersentuhan dengan gagasan kapitalisme. Artinya, sementara pemerintah tetap berperan penting dalam pengelolaan jaminan sosial, pembiayaan dan pelaksanaan berbagai program jaminan sosial dan pelayanan sosial merupakan upaya bersama antara sektor publik dan swasta.

Secara istilah etimologi negara kesejahteraan terdiri dari dua kata yaitu Negara dan kesejahteraan. Negara adalah institusi sosial dengan kemampuan untuk mempengaruhi hubungan interpersonal dan menciptakan kekuatan sosial. Kesejahteraan diartikan sebagai keselamatan atau kemakmuran. Negara kesejahteraan adalah contoh kebijakan pemerintah yang mengarahkan sumber daya menuju perlindungan sosial atau kesejahteraan umum melalui berbagai inisiatif termasuk kesehatan masyarakat, tunjangan asuransi dan lain lain (Jamil, 2021). Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang negara kesejahteraan. Titmuss menawarkan perspektif yang lebih tidak memihak tentang kesejahteraan sebagai hasilnya. Dia mengusulkan kriteria kesejahteraan sebagai masyarakat yang secara terang-terangan menganut akuntabilitas politik untuk mengajar dan melatih penduduknya sendiri untuk memenuhi tuntutan mereka akan tenaga profesional medis, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, insinyur, dan sebagainya. Rekomendasi ini dimaksudkan agar negara-negara kurang berkembang tidak kehabisan tenaga profesional yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional.

Konsep negara kesejahteraan yang masih diperdebatkan. Empat dari diskusi ini berpusat pada definisi konsep inti negara kesejahteraan, termasuk Konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai penyamaran negara kolektivisme dengan mengarahkan pengeluaran, negara kesejahteraan hanyalah awal dari fase absolutisme politik dan yang terakhir dari konsep. Negara kesejahteraan diartikan sebagai kekuatan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan nasional. Kesejahteraan dipandang sebagai cara berfokus pada kesejahteraan materi dari orang yang kurang mampu. Terlepas dari tarik-menarik ideologis antara kapitalisme dan sosialisme, diskusi ini terus berlanjut. Tersirat bahwa konsep mendasar dari negara kesejahteraan dari

REFERENSI

- Abd-Al Khair Mohd. Jalaluddin. (1999). *The Role Of Goverment In An Islamic Economy*. A.S. Noordeen.
- Adi Fahrudin. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama.
- Christopher Pass Dan Bryan Lowess, C. K. (N.D.). *Collin Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj Tumpal Rumapea Dan Posman Halolo. Pustaka Erlangga.
- Bertram Schulin, "Solidarity And Subsidiarty", Dalam Werner Lachmann Dan Hans Jurgen Rosner, *Social Security In Social Market Economy*, (Konrad, Adeneauer, Stiftung: Arbeitsbereich Internationale Zusammenarbeit, 1995)
- Chapra, M. U. (2000). *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.
- Dahlan Siamat. (2013). *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Merupakan Prioritas*.
- Dahuri, Rokhmin, "The Celestial Economy", Skh Republika, Kolom Politik, Tanggal 25 Nopember 2004.
- Edi Suharto, "Globalisasi, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia", copyright tahun 2004 (<http://www.policy.hu/suharto/makIndo10.html>)
- Fathurrahman Djamil. (2013). *Sejarah Dan Teori Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Haedar Navqi. (2009). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam Dan M. Ufuqul Mubin. Pustaka Pelakar.
- Hutauruk, A. H. (2021). *Filosofi Negara Kesejahteraan yang Dirumuskan Dalam Pancasila Dan Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945*. SOL JUSTISIO, 3(1 Juni), 287-303.
- Jamil, I. (2021). *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia*. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 183-197.
- Jamil, I. (2021). *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia*. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 183-197.

- Junaidi, J., & Saleha, N. U. (2021). KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT M. UMER CHAPRA. *Syariah*, 9(1), 13-36.
- M. Abdul Mannan. (1999). *Ekonomi Islam, Teori Dan Praktik*, Terj Nastangin. Dana Bakti Prima Yasa.
- Masudul Alam Choudhury. (2009). *The Foundations Of Islamic Political Economy*. Macmillan Press Ltd.

BAB 3

EKONOMI POLITIK STABILITAS SOSIAL

A. PENGANTAR

Setiap negara mengutamakan stabilitas ekonomi warganya. Hal ini penting karena masalah ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan tingkat inflasi yang tinggi akan muncul jika perekonomian suatu negara tidak stabil. Dalam membahas ekonomi secara keseluruhan memiliki variabel-variabel yang saling berhubungan yang mempengaruhi stabilitas perekonomian. Perekonomian Indonesia dikatakan tidak stabil karena beberapa alasan, salah satunya adalah inflasi yang tinggi yang sering disebabkan oleh krisis global, manajemen yang buruk, produksi yang rendah, dan pergeseran ekonomi yang sistemik.

Transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang sengaja dilakukan ke arah yang diinginkan melalui kebijakan dan strategi adalah contoh pembangunan. Mengubah dalam desain keuangan, misalnya, bisa dilihat melalui kemajuan atau perkembangan kreasi cepat di area modern apalagi administrasi, jadi komitmennya gaji masyarakat semakin besar.

Di sisi lain, seiring dengan kemajuan industrialisasi dan modernisasi ekonomi, kontribusi sektor pertanian akan berkurang secara proporsional. Mengubah harus terlihat melalui sirkulasiberkembang melalui perolehan nilai masuk ke aset keuangan, seperti pelatihan, kesejahteraan, penginapan, air sempurna, kantor olahraga, dan dukungan disiklus dinamika politik. Sebaliknya, perubahan budaya seringkali dikaitkan dengan pergeseran nilai dan norma masyarakat, seperti dari spiritualisme ke materialisme atau sekularisme, serta kebangkitan nasionalisme dan semangat kebangsaan. Menurut D.T. Tikson dalam Zulkarnaen, “pergeseran penilaian tinggi, dari lembaga tradisional ke organisasi modern dan rasional.

Negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Adam Smith menegaskan bahwa tujuan negara yang dimaksud adalah memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara apapun bentuknya. Baik secara sosial maupun politik, situasi yang tidak stabil membuat kemakmuran sulit dicapai. Kedua, negara harus memajukan kemakmuran ekonomi bagi seluruh warga negara dan memupuknya. renungan Adam Smith itu menegaskan, pergantian peristiwa itu terkoordinasi tidak

eksklusif terletak pada perkembangan moneter yang tinggi, bagaimanapun, sementara juga diatur untuk pembentukan keadaan sosial. Artinya, dimensi ekonomi dan sosial merupakan dua macam dimensi yang dapat dijadikan entry point untuk mengukur pembangunan

Landasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, adalah stabilitas ekonomi. Apabila terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi, maka stabilitas perekonomian akan tercapai. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah dengan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Stabilitas sosial ialah keadaan damai dalam suatu negara karena politik, ideologi, sosial ekonomi, militer dan gangguan atau gangguan lainnya dapat dihindari. Stabilisasi mengacu pada kemampuan organisme untuk mengurangi populasi, komunitas, gangguan dan tekanan eksternal. Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan adanya perkembangan yang cukup tinggi serta penambahan kualitas pertumbuhan. Kegiatan ekonomi yang kurang stabil menantang masyarakat untuk merencanakan masa depan, baik untuk individu maupun rumah tangga.

B. KONTEKS KESTABILAN SOSIAL DI INDONESIA

Stabilitas sistem keuangan Indonesia ditentukan oleh tingkat gejolak dalam bidang perbankan serta lapak keuangan baik mendunia ataupun dalam negeri. Krisis keuangan dunia yang muncul hingga saat ini disebabkan dengan tidak adanya keseimbangan di sektor keuangan yang disebabkan oleh bekerjanya kerangka acuan; hilangnya fungsi mediasi dari kerangka acuan merupakan faktor ketidakstabilan. Kestabilan lembaga keuangan biasanya tercermin dari perbankan yang baik dan peran perantara perbankan dalam memperoleh tabungan masyarakat untuk angsuran serta pengeluaran biaya lain dari lingkup pengusaha. Lembaga keuangan memegang peranan yang sangat berpengaruh dalam perekonomian, bank dapat meningkatkan perekonomian negara dengan meningkatkan penggunaan dana dalam perekonomian dan selanjutnya mendukung dana tersebut melalui layanan

REFERENSI

- Alma'arif. (2014). Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, volume 1, 1–17.
http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL_PRODI.pdf
- Fadhlulloh, Z. H. H. (2018). Peran Pemerintahan Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Perindag DIY). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Fatimah, F., & Kasman, R. (2020). MENINGKATKAN MUTU MASYARAKAT MELALUI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS EKONOMI DAN SOSIAL. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(4), 405-411
- Ferry Prasetyia. (2012). Modul Ekonomi Publik. *Modul Ekonomi Publik Bagian VI : Analisis Biaya Dan Manfaat*, 37.
- Kompetensi, A. (n.d.). *Pembelajaran 4 . Konflik Sosial dan Integrasi Sosial*. 109–130.
- Pemerintah, P., & Pasar, S. E. (n.d.). *Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar*. 183–208.
- richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.

BAB 4

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PENGANTAR

Sekilas, politik dan bisnis tampaknya tidak memiliki hubungan yang kuat. Pasar, jual beli, dan pertukaran barang dan jasa - baik online maupun offline - adalah aspek ekonomi. Di pasar, mal, bursa, aplikasi, dan platform digital, orang mengontrol lokasi mereka. Di parlemen, di kantor-kantor pemerintah, dan di tempat pemungutan suara (TPS) selama pemilihan parlemen, pembicaraan tentang merebut, memperluas, dan mempertahankan kekuasaan tampaknya tidak ada hubungannya dengan masalah politik.

Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan hubungan yang kuat antara politik dan bisnis. Dibandingkan dengan koin, politik dan ekonomi seperti dua sisi mata uang yang sama dengan nilai yang sama. saling memberi nilai yang hanya bisa ada jika keduanya hadir pada saat bersamaan. Pertimbangan ekonomi hampir selalu diperhitungkan dalam setiap keputusan politik. Perekonomian juga tidak dapat berfungsi tanpa keputusan politik. Bahkan, masalah ekonomi mereda karena keputusan politik. Politik terlibat ketika mengimpor dan mengeksport barang dari satu negara ke negara lain. Misalnya, jumlah beras yang akan diimpor Indonesia dari Vietnam tahun ini merupakan keputusan politik. Meski beras merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan gizi, pemerintah memandang pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Hal ini terutama berlaku untuk pertumbuhan lapangan kerja, yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan rata-rata angkatan kerja tahunan. Selain itu, sebagai salah satu kekuatan ekonomi dalam negeri yang penting, toko barang bekas dapat mendorong tumbuhnya daya beli masyarakat. Pembangunan dapat mempercepat pengiriman bantuan pemerintah individu melalui proyek-proyek penting sementara yang memberikan sebagian besar kepada sektor keuangan mikro dan pengembangan UKM.

Namun, jika pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali benar-benar menyuburkan ketimpangan pendapatan sektoral, ekonomi dan sosial, serta ketimpangan antar pelaku ekonomi, maka pilihan kebijakan ekonomi yang memberikan keberpihakan, peluang, dan akses masyarakat yang luas harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang hanya mendorong konsentrasi ekonomi yang monopolistik atau terpusat, biasanya didominasi oleh kelompok ekonomi besar, melanggengkan rantai ketimpangan ekonomi lintas sektor.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali disertai dengan tata kelola ekonomi yang tidak merata. Akibat pertumbuhan ekonomi tersebut, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi terbuka semakin meningkat. Penanaman modal asing yang biasanya bersifat monopolistik dan tidak membentuk rantai ekonomi baru (multiplier effect) yang dapat mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi dasar, memperburuk keadaan ini. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami masa defisit pembangunan ketika pertumbuhan ekonomi tidak dikontrol secara ketat oleh pemerintah, mengikuti arus pasar (mekanisme pasar) dan menawarkan fleksibilitas hanya kepada investor dan pelaku ekonomi besar.

Fokus pemerintah pada persoalan ekonomi dalam negeri tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan untuk meningkatkan kemakmuran dan meningkatkan daya beli masyarakat; Melainkan membutuhkan penguatan atau harmonisasi politik sebagai alat penyeimbang dan menjadi tujuan utama tercapainya pemerataan kesempatan usaha yang adil, akses sumber daya keuangan, dan pemerataan pengelolaan program. perekonomian negara

Meskipun setiap pemerintah berusaha untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (rasio gini) dan angka kemiskinan melalui solusi kebijakan yang berbeda, upaya tersebut tidak cukup dan bahkan tidak berkurang. Padahal, ketimpangan ekonomi Indonesia merupakan masalah klasik yang tak pernah terselesaikan. Keadaan ini semakin memprihatinkan karena Indonesia menghadapi sejumlah masalah ekonomi yang serius seperti: daya beli masyarakat yang rendah, penurunan pendapatan untuk belanja daerah, semakin terbatasnya ketersediaan anggaran negara dan pengawasan.

B. EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Martin Staindland, seorang rekannya, menjelaskan bahwa ekonomi politik merupakan kajian khusus yang berfokus pada persinggungan ekonomi dan politik dalam kerangka teoritis dalam buku *Political Economy* karya Karangan Deliarnov. Ekonomi politik dan ekonomi politik sering disalahpahami. Namun, pendekatan ini juga terasa lebih enak. Stainland memelopori analisis ekonomi, khususnya penerapan strategi yang diturunkan dari teori politik untuk mencapai kemakmuran ekonomi. *Economia politica* adalah pendekatan analitis peningkatan kohesi politik berdasarkan teori ekonomi. Oleh karena itu, salah satu dari sekian banyak penelitian yang berkonsentrasi pada pengurangan ketimpangan adalah analisis kebijakan ekonomi. Dengan bantuan teori ekonomi, ekonomi politik adalah salah satu metode dimana kekuasaan politik dijalankan.

REFERENSI

- Alfinn, Mely G. Tan, dan Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
- D.C Korten dan Syahrir . 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta David C. Korten 1993. Menuju Abad ke 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sritua Arief . 1988. Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan. Pustaka Cidesindo, Jakarta Didin Damanhuri. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan. IPB Press, Bogor
- Ahmad Erani Yustika. 2013 Ekonomi Kelembagaan. Penerbit Erlangga, Jakarta Baker, David, 1980, "Memahami kemiskinan di Kota". Prisma, 6 98), hal. 3- 8.
- Dawam Raharjo, 1984, Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Effendi, Tajuddin Noor, 2000, Pembangunan Krisis, dan Arah Reformasi, Muhnmmadiyah Universitas Press, Jakarta.
- Danny Burns. 1994. The Politics of Decentralisation. The Mac Millan Press Ltd, London
- Cholisin. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Materi yang disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepada Bagian/Kepala Urusan hasil Pengisian di Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2011.
- Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Jurnal Naskah No. 20. Bappenas RI
- Suryono, Agus. 2006. Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial. Malang : UM Press

BAB 5

EKONOMI POLITIK SEKTOR MARITIM

A. PENGANTAR

Sebagai negara kepulauan Pasifik, Indonesia memiliki garis pantai yang lebih luas dari tepian Laut Hindia. Secara topografi, Indonesia terbagi menjadi tiga bagian utama: dua lautan, dua daratan, dan ketinggian yang sangat rendah. Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau antara Sabang dan Merauke. Indonesia memiliki luas daratan 7,81 juta km², lautan seluas 3,25 juta km², dan zona moneter selektif (ZEE) seluas 2,55 juta km². Terletak di antara daratan Asia dan Australia, Laut Hindia dan Pasifik, serta garis pantai seluas 95.181 km². Menjadi negara kepulauan dengan pantai laut yang luas, perairan liar dan lautan (Safril dan Ridwan, 2017).

Indonesia juga harus disinggung sebagai negara lautan karena merupakan negara kepulauan. Tragisnya, orang tidak tepat menyebut Indonesia sebagai negara laut. Pendorong utamanya adalah bahwa sejak lama pandangan dunia perbaikan Indonesia cenderung ke daerah sentral. Perbedaan yang dikembangkan antara daratan dan lautan adalah hasilnya. Negara laut adalah negara yang memanfaatkan wilayah lautnya untuk pengiriman secara keseluruhan. Bergabung dengan Realm, Amerika Serikat, Singapura, Cina, dan Panama adalah beberapa contoh negara laut. Negara-negara ini disinggung sebagai negara kelautan karena mereka benar-benar, secara luas, sengaja, dan ekonomis menangani kemajuan laut mereka. Berdasarkan realitas dan situasi yang dapat diverifikasi, negara Indonesia telah berjaya di wilayah laut. Diketahui bahwa berbagai kerajaan Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Bone, dan lain-lain, umumnya berperan sebagai lalim lautan.

Menjadikan Indonesia sebagai hub laut dunia merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menyadarkan kembali jiwa kelautan. Dengan menjadikan bisnis kelautan sebagai pendulum, panduan, atau penentu dan menjadikannya tujuan untuk mengumpulkan biro yang berfungsi, pusat laut dunia dibingkai dan dimajukan sebagai strategi pemerintah. Demikian pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Publik 2015-2019, Perkamen Nomor 2

Tahun 2015, yang mengkaji World Sea Hub, masuk akal gagasannya (RPJMN).

Pembaharuan budaya kelautan Indonesia merupakan andalan utama dari lima titik tumpu utama pendukung Indonesia sebagai poros laut dunia. Titik pendukung berikutnya adalah kewajiban untuk mengawasi aset laut dengan penekanan pada mengakui kekuasaan atas barang-barang laut melalui peningkatan usaha penangkapan ikan dengan menjadikan pemancing sebagai titik pendukung utama. Titik dukungan ketiga adalah janji untuk mendorong peningkatan kerangka kerja dan jaringan laut dengan membangun biaya laut, pelabuhan, dan kayu gelondongan. Terakhir, jaminan untuk mengamankan dan mengawasi aset laut. (Simela, 2014).

Poros maritim adalah ide taktis yang digunakan untuk menjaga hubungan antar pulau, memajukan industri perikanan dan perkapalan, meningkatkan perjalanan maritim, dan memprioritaskan keamanan maritim. Latar belakang dari banyaknya isu di industri kelautan tidak lain adalah munculnya poros maritim. Menurut informasi Badan Pemeriksa Keuangan (2013), industri perikanan laut bisa meraup hingga Rp 365 triliun per tahun. Apalagi, Indonesia terjepit di antara Australia dan Asia, dua benua yang krusial bagi jalur perdagangan global (Maksum, 2015). Nilai potensi sumber daya maritim Indonesia juga sangat besar, yakni Rp 17.000 triliun per tahun. Karena itu, perlu kehati-hatian saat membangun infrastruktur untuk umat manusia. Untuk itu perlu adanya teknologi kemaritiman. Penelitian dan pengembangan pendidikan di bidang kemaritiman harus dikembangkan. Sektor maritim, perkapalan, dan perkapalan harus tumbuh sebesar-besarnya. Selain itu, langit mengandung gas dan air yang melimpah, serta potensi kekayaan ikan yang luar biasa tinggi, wisata yang menawan, bahkan ombak yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber energi listrik yang sangat aman. Semua orang Indonesia harus memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang luar biasa dengan menggunakannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka.

B. PENGERTIAN EKONOMI POLITIK DAN MARITIM

a) Ekonomi politik

Menurut Mosco, ekonomi politik adalah studi tentang interaksi sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang ada antara sumber produksi, distribusi,

REFERENSI

- Adhi, K. (2020). Study Ekonomi Maritim. In *Bab I* (Nomor November).
https://www.academia.edu/45610150/STUDY_EKONOMI_MARITIM
- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Derakhshan, Z., Baghapour, M. A., & Ranjbar, M. (n.d.). *h c v i o e f*.
- Edrian, M. (2017). Melihat Keamanan Maritim Indonesia Dari Ide Poros Maritim. *Defendonesia*, 2(2), 17–24.
<https://doi.org/10.54755/defendonesia.v2i2.60>
- Khanisa, & Farhana, F. (2018). *Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*.
- MANGGAGA, I. P. (2018). Komodifikasi Konten Televisi Dalam Perspektif. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 19(2), 257–276.
perpustakaan . uns . ac . id. (n.d.).
- Purwanto, B. (2015). Perkembangan Industri Maritim Nusantara (Kenyataan Dan Harapan). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 167–177.
https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen/article/view/300

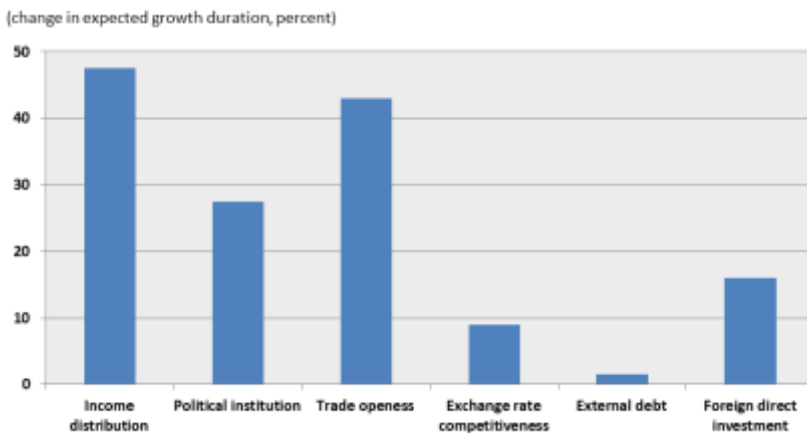
BAB 6

EKONOMI POLITIK GLOBALISASI

A. PENGANTAR

Globalisasi merupakan istilah ketika suatu negara telah mengambil keputusan untuk memasuki dunia internasional, suatu negara harus mampu mengikuti perkembangan dari segala aspek dan tanggap dalam menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi dari segala bidang baik itu bidang sosial, ekonomi maupun politik (Bhambra, 2020). Pada era globalisasi saat ini, terjadi perubahan-perubahan yang sangatlah mencolok dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu suatu negara tidak dapat mengasingkan atau mejauh dari negara lain dan mampu beradaptasi mengenai sistem yang diterapkan dalam menjalin hubungan antar negara.

Salah satu aspek yang mengalami perubahan yang sangat pesat adalah aspek ekonomi yang juga berhubungan dengan dunia politik antar negara (Tunggal, 2013). Dalam bidang ekonomi, salah satu hal yang menjadi latar belakang dari pertumbuhan perekonomian suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju adalah proses globalisasi. Terdapat banyak faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut ada yang berdampak besar dan juga kecil, untuk melihat seberapa besar dampak tersebut dapat dilihat dari diagram dibawah.



Gambar 1. Diagram faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang (Berg Ostry, 2011. Sumber: Wikipedia)

Diagram tersebut menunjukkan bahwa faktor yang memiliki dampak paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang, adalah Income distribution (kesetaraan penghasilan) sebesar 48%, kemudian Trade openness (keterbukaan perdagangan) sebesar 42%, Political institution (lembaga politik) sebesar 28%, Foreign direct investmen (Investasi asing) 17%, Exchange rate competitiveness (daya saing nilai tukar) 9%, dan terendah adalah External debt (utang luar negeri) sebesar 1%.

Dalam ekonomi politik global atau internasional, nampak jelas terjadi pertentangan meningkatnya integritas dari perekonomian internasional dengan adanya tujuan negara untuk mengelola perekonomian dan kekuasaan politiknya secara bersamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan perdagangan bebas dimana negara mengharapkan keuntungan dari negara lain dan juga ingin melindungi kekuasaan politik yang dimiliki. Maka dari itu, secara logika kegiatan negara berjalan sesuai dengan sistem pasar, dilihat secara geografis perluasan pasar terus dilakukan begitupun dengan kerjasama antarnegara juga diperluas melalui sistem penentuan harga (Adiputra, 2014). Seperti diketahui, suatu negara tidak dapat terlepas dari yang namanya pasar. Begitupun dengan ekonomi dan politik. Hal itu dapat dilihat pada sektor politik yang disajikan dalam suatu negara, dan ekonomi disajikan dalam pasar, kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan yang kuat.

REFERENSI

- Adiputra, H. C. (2014). Makalah Ekonomi Politik Internasional. In *Gudangwoengkepo.Blogspot.Com*.
- Alamsyah, A. (2013). Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Perspektif Liberal. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 1–6.
- Arwanto, A., & Anggraini, W. (2021). Dinamika Ekonomi Politik Global Dan Pembagian Kerja Internasional. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 14(2), 23–34. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1977>
- Ayittey, F. K., Ayittey, M. K., Chiwero, N. B., Kamasah, J. S., & Dzuvoor, C. (2020). Economic impacts of Wuhan 2019-nCoV on China and the world. *Journal of Medical Virology*, 92(5), 473–475. <https://doi.org/10.1002/jmv.25706>
- Bhambra, G. K. (2020). Colonial global economy: towards a theoretical reorientation of political economy. *Review of International Political Economy*, 28(2), 307–322. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1830831>
- Dr. Erna S Widodo, SS, M. (2017). Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme Dan Liberalisme. *Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha*, 1(1), 8–9.
- Jackson, R., & Sorenson, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Pustaka Belajar.
- Kurniawan, R. C. (2011). Global Governance Perspektif Liberalisme. *Jurnal Publica*, 1(2), 1–7.
- Kusno, F. (2020). Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19. *Anterior Jurnal*, 19(2), 94–102. <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1495>
- Letto Gillies, G. (2003). The Role of Transnational Corporations in the Globalisation Process. In *The Handbook of Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Maiwan, M. (2015). Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(1), 109–125. <https://doi.org/10.21009/jimnd.v15i1.9114>
- nel arianty. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における

健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 14(02), 144–150.

- O'Brien, R., & Williams, M. (2020). Global Political Economy. In *Evolution and Dynamics*. Bloomsbury Publishing.
- Perraton, J. (2003). The Scope and Implications of Globalization. In *The Handbook of Globalisation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Pomfret, R. (2014). Expanding the Division of Labour: Trade Costs and Supply Chains in the Global Economy. *Australian Economic History Review*, 54(3), 220–241.
- TAMPUBOLON, E., PUTRA, S. A., & ... (2022). EKONOMI POLITIK (Dalam Perspektif Manajemen). In ... *Pelita Indonesia Press*.
- Tunggal, A. restuning. (2013). *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL: POLITIK, EKONOMI, KEAMANAN, DAN ISU GLOBAL KONTEMPORER* (pp. 1–10). Leutikaprio. <http://www.feb.ui.ac.id/jurnal-internasional/>
- Tyner, J. (2019). *Dead Labor: Toward a Politycal Economy of Premature Death*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Waters, M. (2001). *Globalization 2nd Ed*. Routledge.
- Wisnu, D. (2018). Ekonomi Politik Internasional. In *Rows Collection* (p. 729).

BAB 7

EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA HUTAN

A. PENGANTAR

Sumber daya hutan Indonesia memberi berbagai manfaat yang dirasakan dalam skala regional, nasional, bahkan global. Keuntungan konkrit meliputi kayu, sumber daya non-kayu seperti rotan, bambu, dan damar, sedangkan manfaat tidak berwujud meliputi pelestarian lingkungan dan keragaman genetik. Penggunaan SDH yang berlebihan telah dihasilkan dari kegagalan untuk mengevaluasi dengan benar banyak keuntungan yang diberikannya. Ini karena banyak individu dan organisasi belum melihat nilai penuh SDH dan banyak keuntungannya. Mengevaluasi semua keuntungan yang dibawa oleh SDH sangat penting untuk memahami keuntungan tersebut. Tujuan dari penilaian diri adalah untuk mencoba mencari tahu seberapa berguna atau pentingnya sesuatu bagi manusia.

Hanya sampai ketersediaannya terancam barulah nilai ekonomi hutan menjadi nyata, yang pada gilirannya mengancam kesejahteraan manusia. Beberapa keunggulan hutan, seperti hidrologi, keanekaragaman hayati, dan keindahannya, tidak dikonsumsi melalui sistem pasar. Meskipun demikian, penduduk setempat mengambil bagian dalam kebiasaan lama menggunakan keuntungan hutan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk keuntungan komersial. Pemanfaatan barang dan jasa hutan merupakan hasil sampingan dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bukan merupakan kegiatan ekonomi tersendiri (tidak dapat dipasarkan). Penilaian komoditas dan jasa tertentu yang berasal dari sumber daya hutan tidak dapat dilakukan secara memadai dengan menggunakan pendekatan pasar karena penggunaannya yang masih terbatas dan belum diperdagangkan (Munandar, 2016)

Informasi ini dapat digunakan untuk menyarankan pembuat kebijakan tentang cara terbaik mendistribusikan keuntungan sumber daya alam (SDA), yang semakin terbatas karena aktivitas manusia. Dengan laju ekspansi populasi saat ini, yang memberikan tekanan signifikan pada SDH, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih baik dengan menentukan nilai ekonomi riilnya. Namun demikian, tidak semua keuntungan SDH dihargai di pasaran, sehingga metode harus dikembangkan untuk menentukan berapa banyak uang yang benar-benar bernilai dari manfaat

ini. Sebagai contoh, kayu memberikan fungsi biologis dan lingkungan yang penting dengan menyerap karbon. Berbagai keunggulan SDH, bagaimanapun, belum dinilai secara memadai dalam perhitungan ekonomi karena sifatnya yang non-pasar. Namun ketika orang melihat keadaan sumber daya alam yang memburuk, mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya keuntungan lingkungan. Akibatnya, beberapa pendekatan telah dikembangkan untuk menetapkan nilai moneter pada keuntungan SDH, apakah keuntungan tersebut diperdagangkan di pasar terbuka atau tidak.

B. DEFENISI SUMBER DAYA HUTAN DAN PENGGUNAANNYA

Sumber daya hutan adalah segala sesuatu yang diambil dari dalam hutan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia atau melakukan kegiatan ekonomi (jual beli) untuk meningkatkan taraf hidup setiap orang. Sumber daya alam yang ditemukan di hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Baik keuntungan langsung maupun tidak langsung dapat diperoleh melalui penggunaan sumber daya hutan. Ada beberapa keuntungan yang jelas, seperti akses ke bahan bangunan, makanan, dan bahan mentah. Pemanfaatan untuk rekreasi, konservasi dan pengelolaan DAS, dan pengendalian erosi hanyalah sebagian dari keuntungan tidak langsung. Ekstraksi sumber daya hutan melibatkan penggunaan lahan hutan untuk ekstraksi sumber daya hutan kayu dan non-kayu, serta penyediaan jasa lingkungan, dengan tujuan memaksimalkan ekstraksi ini untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar sambil memastikan kesehatan jangka panjang dari hutan. Dengan memaksimalkan dan mengintegrasikan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan, pemanfaatan sumber daya hutan ini dapat berkelanjutan dan tidak mengorbankan peran utama hutan.

Hutan adalah suatu wilayah yang ditumbuhi dengan lebat oleh berbagai tumbuhan hidup seperti pohon, semak, paku-pakuan, rerumputan, jamur, dan sebagainya dan meliputi wilayah yang cukup luas. Indonesia memiliki berbagai jenis hutan, dan banyak di antaranya telah rusak parah akibat aktivitas manusia seperti kebakaran hutan dan penebangan liar.

Menurut komunitas keuangan, berinvestasi pada hak pengusaha hutan adalah keputusan jangka panjang yang sangat bijak. Menurut kriteria ilmiah, hutan mungkin agak berbeda satu sama lain. Sebaliknya, para ahli silvikultur tidak sependapat dengan mereka yang ahli dalam pengelolaan hutan atau

REFERENSI

- Baharuddin, and Ira. 2009. *Hasil Hutan Bukan Kayu*. makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Kamalluzaman n. 2013. *Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai*. Universitas Sumatera Utara.
- Munandar. 2016. “Valuasi Ekonomi Pemanfaatan Hasil Hutan Yang Tidak Dapat Dipasarkan Pada Kawasan Hutan Lindung Taman Hutan Raya Sultan Adam Kalimantan Selatan.” *Jurnal Hutan Tropis* 4(2):109–19.
- Mustamin, Winda Rezky. 2018. “Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2018.” 2(1):32–39.
- Nur Farida. 2016. *KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN*. Mataram: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MATARAM.
- Simon. 2006. *Hutan Jati Dan Kemakmuran, Problem Dan Strategi Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarto. 2006. *Illegal Logging Di Kalimantan Selatan (Studi Di Taman Hutan Raya Sultan Adam Kalimantan Selatan)*. Yogyakarta.

BAB 8

EKONOMI POLITIK SEKTOR PERTANIAN

A. PENGANTAR

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam perekonomian suatu negara karena berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri (Atabek 2016). Di Indonesia, sektor pertanian memiliki andil yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk (Damayanthi 2018). Namun, sektor pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya produktivitas, akses terbatas terhadap teknologi dan pasar, serta permasalahan harga yang tidak stabil. Oleh karena itu, analisis ekonomi politik sektor pertanian sangat relevan untuk dilakukan agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional (Al Insany and Fauzi 2020). Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 14,41% terhadap PDB pada tahun 2022 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 28,7 juta orang atau sekitar 22,9% dari total angkatan kerja di Indonesia. Namun, produktivitas sektor pertanian Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas sektor pertanian antara lain kurangnya akses terhadap teknologi dan pengetahuan, keterbatasan modal dan akses ke pasar, serta bencana alam dan perubahan iklim.

B. DEFINISI SEKTOR PERTANIAN

Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang terdiri dari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk-produk pertanian seperti tanaman, hewan, ikan, dan produk-produk tambahan seperti pupuk dan pestisida. Sektor pertanian meliputi seluruh proses produksi mulai dari kegiatan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. (Al Insany and Fauzi 2020) Sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri. Di negara-negara berkembang, sektor

pertanian seringkali menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, sektor pertanian juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

Sektor pertanian memiliki fungsi yang sangat penting bagi perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Berikut ini adalah beberapa fungsi sektor pertanian bagi perekonomian:

- a) Menyediakan pangan: Fungsi utama sektor pertanian adalah menyediakan pangan bagi penduduk. Dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dari pertanian, sektor ini menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- b) Menyediakan bahan baku: Sektor pertanian juga menyediakan bahan baku bagi industri makanan dan minuman, tekstil, obat-obatan, kosmetik, dan sebagainya. Oleh karena itu, sektor pertanian memegang peran penting dalam mendukung keberlangsungan industri.
- c) Menyediakan lapangan kerja: Sektor pertanian menyediakan banyak lapangan kerja di daerah pedesaan. Terutama di negara-negara berkembang, sektor pertanian menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk pedesaan.
- d) Mengurangi kemiskinan: Sektor pertanian dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Melalui peningkatan produktivitas dan akses ke pasar yang lebih luas, petani dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
- e) Menjaga kelestarian lingkungan: Pertanian berkelanjutan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Tanaman dapat membantu memperbaiki kualitas tanah dan air, dan juga dapat berperan sebagai penghasil oksigen. Di sisi lain, pertanian yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan, seperti pencemaran air dan pengurangan keanekaragaman hayati.

Mendorong pertumbuhan ekonomi: Sektor pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Melalui pengembangan agribisnis dan peningkatan produktivitas, sektor pertanian dapat menciptakan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru. Selain itu, sektor pertanian juga dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti industri pengolahan makanan dan transportasi.

REFERENSI

- Atabek, Ü. 2006. “İnternette Etik Sorunların Ekonomi Politik Bağlamı.” *Küresel İletişim Dergisi*.
https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/02_umit_atabek.pdf.
- Damanhuri, Didin S, and Institut Pertanian Bogor. 2000. “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 15 (4): 515–27.
- Damayanthi, Vivin Retno. 2008. “Proses Industrialisasi Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Politik.” *Journal of Indonesian Applied Economics* 2 (Mei): 68–89.
- Insany, Muhammad Alif Al, and R. Moh. Qudsi Fauzi. 2020. “Konsep Ekonomi Politik Dalam Perspektif Ibnu Khaldun.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6 (1): 154.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20191pp154-169>.
- Karlıdağ, Serpil. 2013. “Ekonomi Politik Açından Kiisel Verilerin Korunması.” *Cilt* 46: 127–52.
- Kusumah, Fabian Pratama. 2019. “Ekonomi Politik Dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10 (2): 137.
<https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.135-156>.
- Mustapa, Hasan, and Siti Kania. 2022. “Perang Rusia, Covid 19 Dan Revitalisasi: Menimbang Gagasan Politik Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989).” *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5 (1): 64–82.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb->.
- Wardhiani, Wini Fetia. 2019. “Peran Politik Pertanian Dalam Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Sektor Pertanian.” *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3 (2): 83–94.

PROFIL PENULIS

Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.



Lahir di Camba, 05 Desember 1982. Merupakan Dosen tetap di Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar (2003), gelar magister Pendidikan Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Indonesia (2006), dan gelar Dr. (Doktor) dalam bidang Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Malang, Indonesia (2016). Tahun 2021 hingga tahun 2024 menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Sebagai peneliti, telah menghasilkan beberapa artikel penelitian, yang terbit pada jurnal dan prosiding, baik yang berskala nasional maupun internasional, dan telah menghasilkan beberapa buku ajar dan buku referensi serta telah memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Penulis merupakan editor maupun reviewer pada jurnal terakreditasi nasional. Minat kajian utama riset dalam bidang Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Ekonomi Informal, Pendidikan Karakter, kewirausahaan, UMKM, dan Media Pembelajaran. Dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) saat ini terlibat sebagai Tim MBKM Universitas Negeri Makassar. Email Penulis: rahmatullah@unm.ac.id

Konsep ekonomi politik merujuk pada kajian tentang hubungan antara kegiatan ekonomi dan kekuasaan politik dalam masyarakat. Ekonomi dan politik dianggap sebagai dua bidang yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Ekonomi politik melibatkan analisis tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan politik dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti kelas sosial, korporasi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, ekonomi politik mempelajari tentang bagaimana kepentingan dan interaksi antara kelompok-kelompok ini mempengaruhi kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi.

Pendekatan ekonomi politik berfokus pada analisis tentang distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kekayaan dalam masyarakat dan bagaimana faktor-faktor ekonomi dan politik berpengaruh dalam distribusi tersebut. Oleh karena itu, ekonomi politik seringkali memperhatikan keterkaitan antara kebijakan ekonomi, institusi politik, dan struktur sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam ekonomi politik global, analisis fokus pada bagaimana kebijakan perdagangan internasional dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi distribusi sumber daya dan kekayaan di antara negara-negara. Begitu juga dalam ekonomi politik nasional, analisis fokus pada hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter dengan kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, ekonomi politik merupakan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan ilmu ekonomi, politik, sosiologi, dan ilmu lainnya untuk memahami hubungan kompleks antara kegiatan ekonomi dan kekuasaan politik dalam masyarakat.

Mengkaji ekonomi politik memiliki banyak manfaat dan pentingnya antara lain: Memahami bagaimana kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bagaimana kebijakan politik dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Hal ini membantu kita untuk memahami hubungan antara kedua bidang ini dan bagaimana mereka saling mempengaruhi satu sama lain; Memahami bagaimana kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat mempengaruhi kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi. Hal ini membantu kita untuk memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan publik dan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; Mengidentifikasi ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan. Hal ini memungkinkan kita untuk mencari solusi dan mengambil tindakan untuk mengurangi ketidakadilan dan ketimpangan sosial; Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena membantu masyarakat memahami bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi politik; Membantu para pengambil keputusan untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih baik, yang mempertimbangkan faktor-faktor politik dan sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-039-3 (PDF)



9

786231

470393